

**PENGARUH KUNJUNGAN WISATAWAN DAN PENDAPATAN DAYA
TARIK WISATA TERHADAP KEMISKINAN PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

**Kadek Kevin Reynaldi Nugraha¹
Made Heny Urmila Dewi²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: kevinreynaldi28@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan daya tarik wisata, menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan dan pendapatan daya tarik wisata terhadap tingkat kemiskinan, serta menganalisis pengaruh tidak langsung kunjungan wisatawan terhadap tingkat kemiskinan melalui pendapatan daya tarik wisata. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yaitu, data kunjungan wisatawan, pendapatan daya tarik wisata dan tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2014 – 2017. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau *path analysis* dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil analisis menunjukkan kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daya tarik wisata. Kunjungan wisatawan dan pendapatan daya tarik wisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pendapatan daya tarik wisata memediasi kunjungan wisatawan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2014 -2017.

Kata kunci: kunjungan wisatawan, pendapatan daya tarik wisata, kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tourist visits on tourist attraction income, analyze the influence of tourist visits and tourist attraction income on poverty levels, and analyze the indirect influence of tourist visits to poverty levels through income tourist attraction. The data used in this study are secondary data in the form of panel data, namely, tourist visit data, tourist attraction income and poverty levels in regencies / cities in Bali Province for the period 2014 - 2017. The analysis technique used is path analysis using Fixed analysis. Model Effect. The results of the analysis show that tourist visits have a positive and significant effect on tourist attraction income. Tourist visits and tourist attraction income have a negative and significant effect on poverty levels. Income from tourist attraction mediates tourist visits to poverty levels in regencies / cities in Bali Province for the period 2014-2017.

Keywords: *tourist visits, tourist attraction income, poverty*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dengan tujuan menciptakan lapangan kerja sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pembangunan merupakan salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh semua negara, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi budaya, politik serta ruang dan waktu (Aristina dkk, 2017). Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kesejahteraan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan standar hidup tertentu. Secara ekonomi sering dianggap sebagai keadaan kekurangan uang dan barang dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu keadaan yang nyata yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010).

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin.

Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Menurut Kuncoro (2004) penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu, adanya perbedaan kepemilikan sumber daya yang menjadikan penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang berdampak kepada produktivitas yang rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah, dan adanya perbedaan akses permodalan. Menurut Williamson (2001) kemiskinan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berakar pada berbagai sektor dan kondisi, sehingga menjadi perhatian utama pemerintah.

Sejak desentralisasi dimulai, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar pada bidang pendidikan, pertanian, industri, perdagangan, investasi dan infrastruktur kepada pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik khususnya di daerah yang kurang berkembang (Alm *et al*, 2001). Selain itu, sumber daya alam (perikanan, kehutanan, pertambangan, gas dan minyak) juga menjadi kewenangan pemerintah daerah (Lewis, 2001). Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah dan kepentingan masyarakatnya.

Kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hutajulu dkk, 2012). Selain itu, tujuan pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Kewajiban pemerintah daerah ialah menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya

Adanya desentralisasi, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat, dengan tujuan dapat menurunkan jumlah kemiskinan (Scott, 2002). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah daerah dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya (Marhaeni dkk, 2014).

Provinsi Bali terdiri atas delapan kabupaten dan satu kotamadya. Bali merupakan rumah bagi sebagian besar minoritas Hindu di Indonesia yang memiliki pantai yang indah, keanekaragaman hayati serta warisan seni dan budaya sehingga menciptakan peluang dalam sektor pariwisata (Tajeddini *et al*, 2017). Bali telah terkenal sebagai tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sejak tahun 1920-an (Picard, 2003). Berkembangnya pariwisata di Bali tidak menjamin semua kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera itu terlihat dari masih adanya penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014 - 2017 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Persentase Penduduk Miskin Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014 – 2017 (Persen)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
Jembrana	5.83	5.84	5.33	5.38
Tabanan	5.61	5.52	5	4.92
Badung	2.54	2.33	2.06	2.06
Gianyar	4.57	4.61	4.44	4.46
Klungkung	7.01	6.91	6.35	6.29
Bangli	5.86	5.73	5.22	5.23
Karangasem	7.30	7.44	6.61	6.55
Buleleng	6.79	6.74	5.79	5.74
Denpasar	2.21	2.39	2.15	2.27
Provinsi Bali	4.76	4.74	4.25	4.25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014 – 2017

Tabel 1 menampilkan data persentase penduduk miskin di Provinsi Bali periode tahun 2014 – 2017 yang mengalami *trend* menurun, namun pada Kabupaten/Kota masih mengalami fluktuatif. Persentase penduduk miskin terendah tahun 2017 berada pada Kabupaten Badung sebesar 2.06 persen yang disebabkan oleh majunya sektor pariwisata, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi tahun 2017 berada pada Kabupaten Karangasem sebesar 6.55 persen yang dikarenakan masih banyaknya penduduk miskin di perdesaan yang disebabkan oleh susahnya masyarakat keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Kecenderungan kemiskinan yang terjadi disebabkan karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan, dan kesempatan kerja maupun pembangunan yang tidak merata yang dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah bekerja keras dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam menjalankan program maupun kebijakan daerah, pemerintah daerah membutuhkan modal yang diantaranya di dapat dari potensi ekonomi daerah (Kusuma, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama yang diperoleh atas potensi dan sumber daya yang dimiliki dan di pungut langsung oleh pemerintah daerah. Menurut Lewis (2006) Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan berbagai jenis pendapatan lainnya. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda karena potensi sumber daya alam dan keadaan geografis yang dimiliki setiap daerah berbeda (Fajrii dkk, 2016).

Menurut Husna dan Yudhistira (2017) semakin besar PAD maka semakin meningkat pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Jolianis (2016), Santosa (2013) dan Oktaviani (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Semakin meningkat PAD maka semakin menurun persentase kemiskinan di daerah tersebut, begitu juga sebaliknya semakin menurun PAD maka semakin meningkat persentase kemiskinan di daerah tersebut dengan asumsi jumlah penduduk konstan. Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014 – 2017 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.
Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali
Tahun 2014 – 2017 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
Jembrana	89.349.645	98.032.646	114.533.487	121.342.475
Tabanan	273.426.482	300.799.021	318.083.799	426.635.751
Badung	2.722.625.563	3.001.464.263	3.563.459.640	4.172.457.396
Gianyar	424.472.546	45.721.018	529864.618	662.753.475
Klungkung	98.837.766	120.035.996	134.142.054	153.210.776
Bangli	76.141.461	87.731.141	104.829.402	104.592.163
Karangasem	239.425.005	243.125.914	318.083.799	198.575.057
Buleleng	219.682.330	293.038.467	282.113.900	455.195.426
Denpasar	698.739.758	776.214.149	807.050.192	1.008.710.712
Provinsi Bali	2.20.416.697	3.041.266.607	3.041.195.258	3.398.472.278

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 – 2017

Tabel 2 menampilkan data Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014 – 2017. PAD terbesar berada pada Kabupaten Badung dengan PAD sebesar 4 triliun rupiah menghasilkan tingkat kemiskinan sebesar 2,06 persen dan Kota Denpasar dengan PAD sebesar 1 triliun menghasilkan tingkat kemiskinan sebesar 2,27 persen. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mampu untuk mencari sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya dan pemerintah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah. Peran PAD sangat penting dalam membiayai pembangunan daerah, disamping itu seluruh pengelolaannya juga menjadi kewenangan daerah.

Upaya dalam mencari sumber-sumber penerimaan PAD dan menurunkan kemiskinan adalah dengan mengandalkan sektor pariwisata. Menurut Viken (2011) pariwisata adalah segala kegiatan wisata dan wisatawan sedangkan Ene dan Baraitaru (2010) menjelaskan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutinnnya. Menurut Vojnovic dan Knezevic (2013) Kontribusi sektor pariwisata berdampak besar terhadap pendapatan daerah. Peranan sektor pariwisata dalam perekonomian dapat dilihat dari pengeluaran wisatawan (Gjorgievski *et al*, 2013).

Menurut Cohen (1984) perkembangan pariwisata berdampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah dampak kepada pendapatan daerah dan pendapatan masyarakatnya. Sektor pariwisata sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan karena memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah dan memberikan masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung pekerjaan, sehingga mampu dalam memenuhi kebutuhan

hidup yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan mengharuskan adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai cara pengentasan kemiskinan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan pendekatan *pro poor tourism*. Pendekatan *pro poor tourism* adalah pendekatan pembangunan di bidang pariwisata yang memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, yaitu manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dan kultural (Suardana dan Dewi, 2015). Tujuannya adalah untuk meningkatkan manfaat pariwisata bagi masyarakat miskin dan meningkatkan partisipasi mereka dalam mengelola produk-produk pariwisata (Holland *et al*, 2003).

Menurut Suardana dan Dewi (2015) perkembangan sektor pariwisata mampu memberikan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat dan membantu mengurangi kemiskinan. Pariwisata juga berperan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, serta mendorong kesempatan pembangunan nasional. Menurut Booth (1990) sektor pariwisata sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan kata lain keuntungan adanya pariwisata adalah daerah tujuan wisata akan memperoleh pendapatan yang bersumber dari Daya Tarik Wisata.

Daya Tarik Wisata (DTW) merupakan tempat yang menjadi sasaran utama bagi wisatawan berkunjung. Menurut Sudibya (2004:262) Daya Tarik Wisata dibedakan menjadi 3 macam, yaitu daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya

tarik buatan manusia. Perkembangan sektor tersebut dapat menjadi sumber baru pendapatan utama di pedesaan, sehingga akan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Untuk mengurangi kemiskinan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penciptaan lapangan kerja, upah yang lebih tinggi, dan tersedianya infrastruktur yang dikembangkan sebagai bagian dari kawasan wisata. Perkembangan Daya Tarik Wisata dan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Bali tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Perkembangan Daya Tarik Wisata Dan Jumlah Kunjungan
Wisatawan Di Provinsi Bali Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata (Tempat)	Kunjungan Wisatawan (Orang)
Jembrana	28	280.526
Tabanan	13	5.333.823
Badung	6	5.025.941
Gianyar	24	3.842.208
Klungkung	7	496.176
Bangli	7	790.822
Karangasem	17	559.232
Buleleng	33	954.730
Denpasar	17	570.236
Total	152	17.853.694

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2017

Tabel 2 menampilkan data perkembangan Daya Tarik Wisata dan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Bali tahun 2017. Kabupaten Tabanan dengan 13 DTW menghasilkan kunjungan wisatawan sebesar 5.333.823 orang dan Kabupaten Badung dengan 6 DTW menghasilkan kunjungan wisatawan sebesar 5.025.941 orang sedangkan pada Kabupaten Buleleng dengan 33 DTW hanya menghasilkan 954.730 orang. Secara keseluruhan jumlah DTW di Provinsi Bali sebanyak 152 DTW dengan kunjungan wisatawan sebesar 17.853.694 orang.

Seluruh daerah di Bali memiliki Daya Tarik Wisata (DTW) yang berbeda-beda dan ada yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat lokal. Adanya potensi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber-sumber penerimaan PAD sehingga apabila pendapatan DTW meningkat maka semakin meningkat pula pembangunan yang dapat dilakukan di daerah tersebut, namun di lain sisi masih ada daerah yang belum mampu mengelola potensi tersebut. Upaya pengentasan kemiskinan dan mengoptimalkan pendapatan DTW sebagai sumber penerimaan dalam PAD perlu adanya sikap profesionalisme dalam pengelolaan.

Meningkatnya penerimaan pendapatan DTW maka meningkat juga kontribusi yang dapat diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014) menyatakan bahwa pendapatan obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar dan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016) menyatakan bahwa retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Apabila jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan.

Kerjasama pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat sekitar sangat diperlukan dalam melakukan promosi dengan mengadakan even/kegiatan sebagai cara untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Dalam memperbesar penerimaan sektor DTW maka pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata agar dapat memberikan sumbangan bagi

pembangunan ekonomi (Wijaya dan Sudiana, 2016). Selain itu, kegiatan mempromosikan potensi pariwisata dapat dijadikan sebagai usaha meningkatkan perekonomian daerah (Binns dan Nel, 2002).

Pendapatan DTW berasal dari pembayaran karcis masuk wisatawan yang berkunjung. Menurut Swantara dan Darsana (2017) Pendapatan retribusi obyek pariwisata adalah sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk serta pendapatan lain yang sah dari obyek pariwisata tersebut. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ke daya tarik wisata maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan daya tarik wisata tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Swantara dan Darsana (2017) kunjungan wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016) menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi obyek wisata, hal ini terjadi karena jumlah kunjungan wisatawan yang terjadi akan diikuti oleh jumlah retribusi obyek wisata.

Secara umum wisatawan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara atau wisman adalah wisatawan yang berasal dari luar negeri sedangkan wisatawan domestik atau wisdom adalah wisatawan yang berasal dari dalam negeri. Semakin meningkatnya kunjungan wisatawan menandakan DTW tersebut maju dan berkembang.

Menurunnya kunjungan wisatawan bisa disebabkan karena kurang memadainya infrastruktur, kurang baiknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan, kurang dalam melakukan promosi dan iklan (baik dari televisi, majalah dan pameran), harga tiket yang terlalu mahal, terjadi bencana alam yang tidak bisa diperkirakan. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan perencanaan, kekuatan dan kelemahan, serta hambatan untuk maju (Chin *et al*, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rukini dkk, (2015) dengan menggunakan analisis *ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)* menyatakan bahwa peramalan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tahun 2019 sebesar 5,07 juta orang. Selain memberikan devisa bagi Negara, wisman juga memberikan keuntungan kepada daerah yang dikunjungi. Menurut Anuar *et al* (2012) bahwa setiap uang yang dikeluarkan wisatawan pada suatu obyek wisata akan mendorong kegiatan ekonomi di obyek wisata yang dikunjungi.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi ini karena Bali memiliki potensi pariwisata yang berkembang dengan sangat pesat bahkan sudah terkenal hingga mancanegara, namun dilain sisi masih terjadi masalah kemiskinan.

Obyek penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan Daya Tarik Wisata dan tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel. Data sekunder

adalah data yang berasal dari pihak lain yang telah mengumpulkan data sebelumnya sedangkan data panel adalah gabungan anantara data *time series* dan data *cross section*. Data kunjungan wisatawan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2014 – 2017 diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali sedangkan data pendapatan Daya Tarik Wisata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2014 – 2017 diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dan data persentase penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2014 – 2017 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Data pada penelitian ini menggunakan data panel. data panel adalah gabungan anantara data data *cross section* dan *time series*. Unit *cross section* pada penelitian ini adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar sedangkan unit *time series* pada penelitian ini adalah periode tahun 2014 – 2017.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Tujuan dari analisis data panel menentukan apakah model yang

digunakan menganut *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Untuk memilih model yang digunakan dilakukan Uji Chow untuk menentukan *common effect* atau *fixed effect* sedangkan Uji Hausman untuk menentukan *fixed effect* atau *random effect*.

HASIL DAN PENELITIAN

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif data penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Kunjungan Wisatawan (Orang)	Pendapatan Daya Tarik Wisata (Ribu Rupiah)	Kemiskinan (Persen)
Mean	1.524.321	25.834.625	5,03
Maximum	5.333.823	142.541.409	7,44
Minimum	131.935	29.187	2,06
Std. Dev.	1.693.218	34.534.276	1,69

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 4 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif variabel kunjungan wisatawan, pendapatan daya tarik wisata dan kemiskinan. Variabel kunjungan wisatawan memiliki nilai rata-rata sebesar 1.524.321 orang, nilai maksimum sebesar 5.333.823 orang sedangkan nilai minimum sebesar 131.935 orang dan standar deviasinya sebesar 1.693.218 orang. Variabel pendapatan daya tarik wisata memiliki nilai rata-rata sebesar 25.834.625 ribu rupiah, nilai maksimum sebesar 142.541.409 ribu rupiah sedangkan nilai minimum sebesar 29.187 ribu rupiah dan standar deviasinya sebesar 34.534.276. Variabel kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 5,03 persen, nilai maksimum sebesar 7,44 persen sedangkan nilai minimum sebesar 2,06 persen dan standar deviasinya sebesar 1,69 persen.

Uji Chow dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan *common effect* atau *fixed effect*. Hasil uji chow dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	269.293807	(8,25)	0.000
Cross-section Chi-square	160.844628	8	0.000

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa diperoleh nilai prob. Sebesar $0.000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya berdasarkan hasil tersebut, maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*. Menurut Utama (2016:163) dalam analisis jalur (*path analysis*), metode yang digunakan untuk anak panah satu arah adalah *Ordinary Least Square (OLS)*, yaitu metode kuadrat terkecil biasa.

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*Path Analysis*), dimana analisis jalur adalah perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel (model kasual) yang diolah dengan menggunakan program *EViews 10*.

Pengujian persamaan struktur 1 dilakukan untuk melihat pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan daya tarik wisata secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program *Eviews 10*. Hasil uji kunjungan wisatawan terhadap pendapatan daya tarik wisata dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Daya Tarik Wisata (Struktur 1)

Variable	Coefficient		Std. Error	t-Statistic	Prob.
	Unstandardized	Standardized			
C	3.714	-	3.336	1.113	0.276
K_WISATAWAN	0.881	0.430	0.244	3.611	0.001

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 6 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan dengan nilai Prob. 0.001 < 0.05 dan *Standardized Coefficient* 0.430 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daya tarik wisata.

Persamaan Struktural 1

$$Y_1 = 0.430X$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program *Eviews9* diperoleh nilai *Standardized Coefficient* sebesar 0.430 dan nilai prob. sebesar 0.001. Nilai *Standardized Coefficient* sebesar 0.430 dan nilai prob. sebesar 0.001 < 0.05 ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya kunjungan wisatawan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daya tarik wisata (Y_1).

Pengujian persamaan struktur 2 dilakukan untuk melihat pengaruh kunjungan wisatawan dan pendapatan daya tarik wisata terhadap tingkat kemiskinan secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program *Eviews 10*. Hasil uji regresi kunjungan wisatawan dan pendapatan daya tarik wisata terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Uji Pengaruh Kunjungan Wisatawan Dan Pendapatan Daya Tarik Wisata Terhadap Kemiskinan (Struktur 2)

Variable	Coefficient		Std. Error	t-Statistic	Prob.
	Unstandardized	Standardized			
C	4.031		0.447	9.019	0.000
K_WISATAWAN	-0.117	-0.300	0.039	-2.981	0.006
PENDAPATAN_DTW	-0.057	-0.299	0.026	-2.211	0.036

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 7 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan dengan nilai Prob. yaitu 0.006 < 0.05 dan *Standardized Coefficient* -0.299 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat

kemiskinan, pendapatan daya tarik wisata memiliki nilai Prob. $0.036 > 0.05$ dan *Standardized Coefficient* -0.298 menunjukkan bahwa pendapatan daya tarik wisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = -0.299X + -0.298Y_1$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program *Eviews10* diperoleh nilai *Standardized Coefficient* sebesar -0.299 dan nilai prob. sebesar 0.006 . Nilai *Standardized Coefficient* sebesar -0.299 dan nilai prob. sebesar $0.006 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya kunjungan wisatawan (X) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2).

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program *Eviews10* diperoleh nilai *Standardized Coefficient* sebesar -0.298 dan nilai prob. sebesar 0.036 . Nilai *Standardized Coefficient* sebesar -0.298 dan nilai Prob. sebesar $0.036 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya pendapatan DTW (Y_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2).

Berdasarkan hasil olahan data, pengaruh langsung suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.
Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian

Hubungan Antarvariabel	Coefficient	Std Error	T-statistic	Prob.	Keterangan
X → Y ₁	0.430	0.244	3.611	0.001	Positif dan Signifikan
X → Y ₂	-0.300	0.039	-2.981	0.006	Negatif dan Signifikan
Y ₁ → Y ₂	-0.299	0.026	-2.211	0.036	Negatif dan Signifikan

Sumber: Data diolah, 2019

Keterangan :

- X : Kunjungan Wisatawan
- Y₁ : Pendapatan Daya Tarik Wisata
- Y₂ : Tingkat Kemiskinan

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel kunjungan wisatawan (X) berpengaruh positif terhadap pendapatan daya tarik wisata (Y_1) dengan nilai probabilitas sebesar 0.001 atau kurang dari 5 persen. Variabel kunjungan wisatawan (X) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) dengan nilai probabilitas sebesar 0.006. Variabel pendapatan daya tarik wisata (Y_1) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) dengan nilai probabilitas sebesar 0.036. Hubungan antar variabel penelitian secara lengkap juga disajikan pada diagram jalur gambar 1. Berdasarkan gambar 1 apabila dicermati bahwa tidak ada koefisien jalur yang memiliki nilai lebih dari satu.

Persamaan Struktural 1

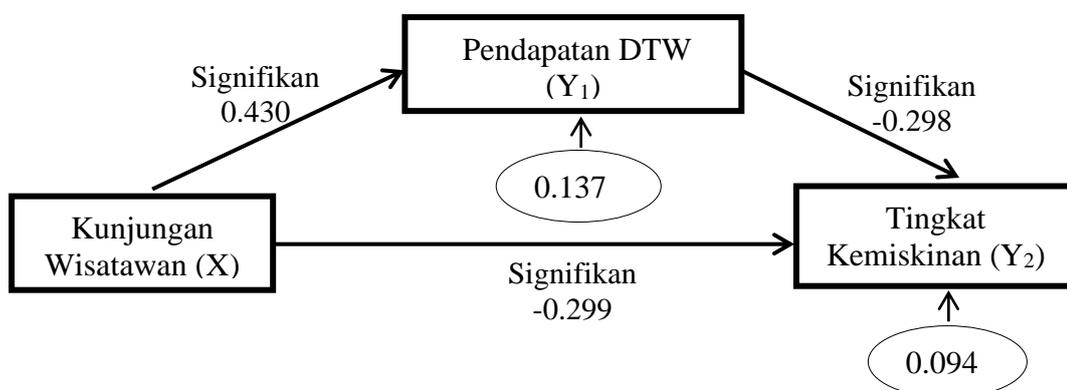
$$Y_1 = 0.430X$$

Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = -0.299X + -0.298Y_1$$

Keterangan:

X : Kunjungan Wisatawan
 Y_1 : Pendapatan Daya Tarik Wisata
 Y_2 : Tingkat Kemiskinan



Gambar 1 Koefisien Jalur Hubungan Antarvariabel Penelitian

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total yang terdapat pada maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 99,9 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 99,9 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 0,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pengaruh tidak langsung suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*) Variabel Penelitian

Hubungan Antarvariabel	Variabel Mediasi	Axb	Sab	Z	Keterangan
X → Y ₂	Y ₁	-0.049	0.017	-2.902	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung kunjungan wisatawan (X) terhadap tingkat kemiskinan (Y₂) melalui pendapatan daya tarik wisata (Y₁) memiliki nilai Z sebesar -2,902 lebih kecil dari -1,96. Hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung kunjungan wisatawan (X) melalui pendapatan daya tarik wisata (Y₁) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y₂).

Koefisien pada Gambar 1 merupakan koefisien hubungan langsung antarvariabel. Pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dari output PLS yang selanjutnya disajikan kembali pada Tabel 10.

Tabel 10.
Koefisien Hubungan Langsung, Tidak Langsung, dan Total Antar Variabel

C	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y1	
X → Y ₁	0.430	-	0.430
X → Y ₂	-0.299	-0.128	-0.427
Y ₁ → Y ₂	-0.298	-	-0.298

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 10 menampilkan koefisien hubungan langsung, tidak langsung dan total antar variabel. Nilai pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan daya tarik wisata sebesar 0.430. Pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap tingkat kemiskinan sebesar -0.299. Pengaruh langsung pendapatan daya tarik wisata terhadap tingkat kemiskinan sebesar -0.298. Pengaruh tidak langsung kunjungan wisatawan terhadap tingkat tingkat kemiskinan melalui pendapatan daya tarik wisata adalah sebesar -0.128.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daya tarik wisata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maka meningkatkan pendapatan daya tarik wisata. Wisatawan yang berkunjung pada daya tarik wisata akan dikenakan biaya tiket masuk sebagai pembayaran atas potensi wisata tersebut.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swantara dan Darsana (2017), dan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sudiana (2016) menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan obyek wisata, hal ini terjadi karena jumlah kunjungan wisatawan yang terjadi akan diikuti oleh jumlah penerimaan obyek wisata.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh kunjungan wisatawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maka menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Dampak pariwisata terhadap masyarakat yaitu setiap kegiatan wisata menghasilkan pendapatan, khususnya bagi masyarakat setempat. Pendapatan tersebut dihasilkan dari transaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat dalam pembelian produk dan penggunaan jasa yang dilakukan wisatawan.

Semakin banyak dan lama wisatawan berkunjung di suatu daya tarik wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tersebut, paling sedikit untuk membeli makan dan minum. Menurut Spillane (1987) belanja wisatawan di tempat wisata juga meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*), yaitu di daerah tempat wisata masyarakat dapat menambah pendapatannya dengan menjual barang dan jasa, seperti menjadi pemandu wisata, menjual makanan dan minuman maupun souvenir. Dengan demikian, kunjungan wisatawan dapat dijadikan alternatif dalam menurunkan kemiskinan.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashley *et al* (2001), Spenceley dan Seif (2003), Torres dan Momsen (2004), dan Patera *et al* (2015) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dengan menerapkan *pro poor tourism* yang memberikan perhatian dan kesempatan kepada masyarakat miskin dalam kegiatan pariwisata berdampak positif terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh pendapatan daya tarik wisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Ini berarti dengan meningkatnya pendapatan

daya tarik wisata maka semakin meningkat pula pendapatan asli daerahnya. Dengan demikian, dana yang dimiliki pemerintah daerah dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat yang masih tergolong miskin sehingga jumlah penduduk miskin menurun.

Adanya pendapatan daya tarik wisata dapat dipergunakan untuk mendukung dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan sehingga dengan meningkatnya pendapatan daya tarik wisata akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2016), Santosa (2013) dan Oktaviani (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil perhitungan didapat perbandingan z hitung yaitu sebesar $-2,902 < -1,96$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti kunjungan wisatawan berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pendapatan daya tarik wisata. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kunjungan wisatawan maka menyebabkan meningkatnya pendapatan daya tarik wisata, apabila pendapatan daya tarik wisata meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah juga mengalami peningkatan. Adanya dana tersebut dapat dipergunakan dalam mendukung dan melaksanakan program maupun kebijakan pengentasan kemiskinan sehingga berdampak terhadap menurunnya tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cohen (1984) menyatakan bahwa dampak dari kegiatan pariwisata adalah

memberikan keuntungan kepada pendapatan daerah selain itu juga menyebabkan berubahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kesejahteraan meningkat dan menurunnya kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi yang dihasilkan dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kunjungan wisatawan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan daya tarik wisata yang berarti semakin meningkatnya kunjungan wisatawan maka meningkat pula pendapatan daya tarik wisata yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang berarti dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maka menurunkan tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sementara itu, pendapatan daya tarik wisata juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang berarti bahwa dengan meningkatnya pendapatan daya tarik wisata maka menurunkan tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pendapatan daya tarik wisata yang berarti dengan meningkatnya kunjungan wisatawan menyebabkan pendapatan yang berasal dari daya tarik wisata juga meningkat sehingga pemerintah memiliki dana dalam mengentaskan kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

SIMPULAN

Kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daya tarik wisata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Artinya dengan semakin meningkat jumlah kunjungan wisatawan maka pendapatan daya tarik wisata juga semakin meningkat. Kunjungan wisatawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, hal ini berarti dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maka menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan pendapatan daya tarik wisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, hal ini berarti dengan meningkatnya pendapatan daya tarik wisata maka menurunkan tingkat kemiskinan. Kunjungan wisatawan berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pendapatan daya tarik wisata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pengelola daya tarik wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan sebaiknya melakukan promosi melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial sehingga wisatawan mengetahui tentang daya tarik wisata dan fasilitas yang ada. Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daya tarik wisata diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana tempat wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi dan lain sebagainya. Pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan diharapkan dapat mendirikan sekolah di bidang pariwisata dan memberikan pelatihan bagi masyarakat yang ingin berkecimpung di dunia pariwisata, selanjutnya dapat bekerja sama dengan masyarakat di pedesaan khususnya di desa yang belum

memiliki daya tarik wisata agar dapat membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata di desa tersebut.

REFERENSI

- Alm, James, Robert H. Aten & Roy Bahl. 2001. 'Can Indonesia decentralise successfully? Plans, problems and prospects'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol.37, No.1, Hal: 83–102.
- Anuar, Ahmad Nazrin Aris., Ahmad Habibah., Hamzah Jusoh., and Mohd Yusof Hussain. 2012. The Roles of Tourism System towards Development of Tourist Friendly Destination Concept. *Asian Social Science*, Vol.8, No.6, Hal:146-155.
- Aristina, Ita., Made Kembar Sri Budhi., I.G.A.P Wirathi dan Ida Bagus Darsana. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 6, No. 5, Hal: 677-704.
- Ashley, Caroline., Dilys Roe and Harold Goodwin. 2001. "Pro-Poor Tourism Strategies: Making Tourism Work For The Poor", *ODI (Overseas Development Institute)*.
- Binns, Tony dan Etienne Nel. 2002. Tourism As A local Development Strategy In South Africa. *The Geographical Journal*, Vol.168, No.3, Hal: 235-247.
- Booth, Anne. 1990. The Tourism Boom in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.26, No.3, Hal: 45-73.
- Chin, Wei Lee., Janet Haddock Fraser & Mark P. Hampton. 2015. Destination Competitiveness: Evidence From Bali. *Current Issues In Tourism*. ISSN: 1368-3500.
- Cohen, Erik.1984. The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings. *Annual Review of Sociology*, Vol. 10, Hal: 373-392.
- Ene, Sebastian George., and Baraitaru., Madalina. 2010. Sustainable Development Strategies in Domestic and International Tourism. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol.2, No.2, Hal: 87-95.
- Fajrii, Muhammad., Delis, Arman., dan Amzar, Yohanes Vyn. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol.9, No.2, Hal: 99 – 107.
- Gjorgievski, Mijalce., Gramatnikovski, Sasko.,and Nakovski, Dejan. 2013. Geographic Positioning as a Determination of Tourism Development of Gevgelija Region. *UTMS Journal of Economics*, Vol.4, No.1, Hal: 61-69.
- Holland. J, Burian M., and Dixey L. 2003 Tourism in Poor Rural Areas. *PPT Working Paper 12*.

- Husna, Nizza Al dan Muhammad Halley Yudhistira. 2017. Studi Empirik Interaksi Strategis Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.10, No.2, Hal: 113 – 124.*
- Hutajulu, Halomoan, Agustina Sanggrangbano dan Antonia K Bonay. 2012. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.5 No.2, Hal: 87-100.*
- Jolianis. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic an Economic Education Vol. 4, No.2, Hal: 192-209.*
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah.* Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.9, No.1, Hal: 1-11.*
- Lewis, Blane D. 2001. The New Indonesian Equalisation Transfer. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.37, No.3, Hal: 325-343.*
- Lewis, Blane D. 2006. Local Government Taxation: An Analysis Of Administrative Cost Inefficiency. *Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol.42, No.2, Hal: 213-233.*
- Marhaeni, AAIN., I Ketut Sudibia., IGAP Wirathi., Surya Dewi Rustariyuni dan Ni Putu Martini Dewi. 2014. Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Piramida Vol. X, No.1, Hal: 8-18.*
- Oktaviani, Atika Nur. 2018. Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. *Economics Development Abalysis Journal Vol. 7, No. 3, Hal: 305-313.*
- Patera, I Made, I Made Sukarsa dan Agung Suryawan. 2015. Tourism and Poverty in Badung Regency, Bali. *E-journal of Tourism Vol.2 No.2: 84-95.*
- Picard, Michel. 2003. Touristification and balinization in a time of reformasi. *Indonesia and the Malay World, Vol.31, No.89, Hal: 108-118.*
- Rukini, Putu Simpen Arini., dan Nawangsih, Esthisatari. 2015. Peramalan. Jumlah Kunjungan Wistawan Mancanegara (Wisman) ke Bali Tahun 2019: Metode Arima. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.8, No.2, Hal: 136 – 141.*
- Santosa. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis Vol. 5, No. 2 Hal: 130-143.*
- Scott, L. 2002. A Poverty Indicator System For Local Government. *Bulletin of Indonesia Economic Studies, Vol. 19, No. 4, Hal: 499–500.*

- Spenceley, Anna and Jennifer Seif. 2003, "Strategies, Impacts and Costs of Pro-Poor Tourism Approaches in South Africa", *International Centre for Responsible Tourism, PPT Working Paper No. 11, hal. 1-44*.
- Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Konisius.
- Suardana, I Wayan dan Ni Gusti Ayu Susrami Dewi. 2015. Dampak Pariwisata Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Karangasem: Pendekatan Pro-Poor Tourism. *Piramida Vol. XI, No.2, Hal: 76-87*.
- Sudibya, Adnyana. 2004. *Manajemen Pariwisata*. Buku Ajar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayanan. Denpasar.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8, No. 2, Hal: 357-366*.
- Swantara, I Kadek Budi Praga dan Ida Bagus Darsana. 2017. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pendapatan PHR, Dan Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud, Vol. 6, No. 12, Hal: 2551-258*.
- Tajeddini, Kayhan, Alf H. Walle & Mela Denisa. 2017. Enterprising Women, Tourism, and Development: The Case of Bali. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration. ISSN: 1525-6480*.
- Torres, Rebecca and Janet Henshall Momsen. 2004. "Challenges and Potential for Linking Tourism and Agriculture to Achieve Pro-Poor Tourism Objectives". *Progress in Development Studies. Vol: 4. No. 4. Hal: 294-318*.
- Utama, Made Suyana. 2016. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Buku Ajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Viken, Arvid 2011. Tourism, Research, And Governance On Svalbard: A Symbiotic Relationship. *The Polar Record, Vol.47, No.4, Hal: 335-347*.
- Vojnovic, Knezevic dan Rade Knezevic. 2013. Economic And Tourism Indicators As A Means Of Monitoring Sustainable Tourism: The Case Of Inland Istria. *UTMS Journal of Economics, Vol. 4, No.2, Hal: 213-230*.
- Wijaya, Ida Bagus Agastya Brahmna dan I Ketut Sudiana. 2016. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. *E-Jurnal EP Unud, Vol.5, No.12, Hal: 1384-1407*.
- Williamson, Deanna L. 2001. The Role of The Health Sector in Addressing Poverty. *Canadian Journal of Public Health. Vol. 92, No. 3, Hal: 178-183*.